

Lapsustik Purwokerto Ikuti Sosialisasi Pengusulan Hak Integrasi Bagi WBP

Narsono Son - BANYUMAS.JOURNALIST.ID

Sep 5, 2022 - 22:24

PENYEMPURNAAN SISTEM DATA BASE PEMASYARAKATAN (SDP)

Bahwa proses penyempurnaan Sistem Data Pemasarakatan (SDP) sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Surat Edaran Dir Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-20.OT.02 Tahun membutuhkan kurang lebih 1 (satu) Bulan.

Atas Perintah Pimpinan Penyempurnaan Sistem Data Pemasarakatan (SDP) dapat terselesaikan 1 (satu) Ming

UPT dapat melakukan update Patch SDP dengan mengu file perbaikan Patch SDP rilis 20220902 13.31 WIB m http://sdp.ditjenpas.go.id/patch_sdp/patchSDP.php

Agar UPT dapat memedomani Surat Nomor PAS.3-UM.0 413 Tentang Pemberitahuan Penyempurnaan Si Database Pemasarakatan (SDP) sesuai Undang-Un Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

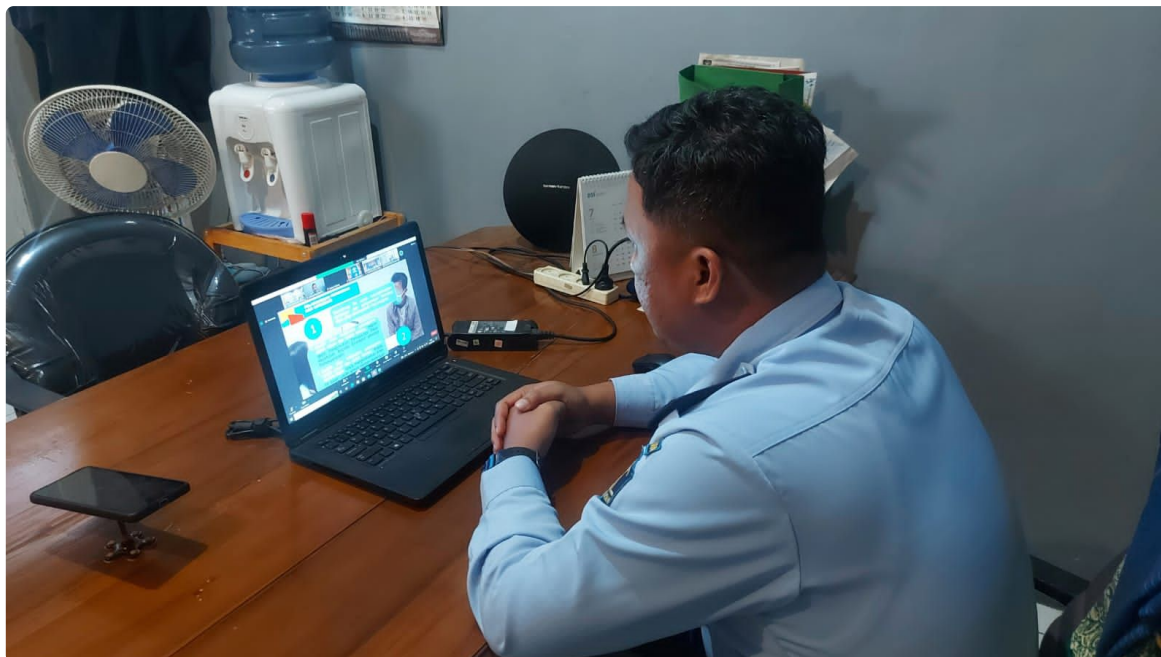
SDP

Lapsustik Purwokerto Ikuti Sosialisasi Pengusulan Hak Integrasi Bagi WBP

BANYUMAS - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan telah resmi disahkan dan diundangkan. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mengenai hak-hak yang berhak diterima oleh narapidana.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

melalui Direktorat Jenderal Pemasaryakatan mengadakan sosialisasi mengenai pengusulan hak integrasi sesuai dengan UU no.22 tahun 2022 tentang pemasaryakatan secara daring melalui aplikasi zoom meeting (Senin, 05/09/2022).



Dalam kesempatan ini Bapak Thurman Saud Marojahan Hutapea selaku Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi beserta Bapak Pujo Harinto selaku Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak memberikan pemaparan materi mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengusulan hak integrasi kepada seluruh WBP.

Dhimas Isdwiyono, selaku Kasi Binadik dan Giatja memberikan sedikit pesan bahwa tujuan diadakkannya kegiatan ini adalah supaya kita mengetahui syarat dan pelaksanaan pemberian hak-hak integrasi kepada seluruh WBP, sehingga WBP dapat menerima hak mereka sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam akhir acara ada sedikit kesimpulan yang disampaikan.

"Semua WBP harus mendapatkan hak bersyarat sesuai dengan ketentuan yang ada dan kepala UPT harus mengawasi proses pengusulan tersebut sehingga semua terkontrol dan berjalan sesuai rencana", Ujar Thurman di akhir sesi.

(N.Son/***)